

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Perlindungan Khusus di Kabupaten Mojokerto sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya upaya perlindungan khusus yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto diantaranya yaitu:

##### **1. Anak Dalam Situasi Darurat**

Pelaksanaan perlindungan Khusus terhadap anak dalam situasi darurat dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto melalui dukungan psikososial *trauma healing* serta pemberian bantuan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, vitamin juga beberapa perlengkapan sekolah.

##### **2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pendampingan psikologis dan hukum. Pendampingan psikologis meliputi asesmen untuk memahami masalah anak dan memberikan dukungan emosional, sedangkan pendampingan hukum mencakup pemberian nasihat, penjelasan proses hukum, dan pemenuhan hak anak selama proses peradilan.

### **3. Anak Korban Tindak Kekerasan**

Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui tindakan pencegahan, seperti sosialisasi anti kekerasan di sekolah, serta tindakan penanganan yang diberikan dengan menyediakan dengan layanan pengaduan online Rangkul Korek Pacare dan pendampingan sesuai tingkat kasus. Namun, pelaksanaan perlindungan ini terkendala oleh kurangnya tenaga psikolog klinis serta adanya anggapan dari pihak keluarga korban dan masyarakat bahwa kasus kekerasan merupakan aib yang harus ditutupi terlebih kasus kekerasan seksual, sehingga kasus yang terjadi belum bisa terungkap secara maksimal.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Perlindungan Khusus di Kabupaten Mojokerto, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster perlindungan khusus. Adapun beberapa rekomendasi saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebaiknya menambah jumlah tenaga profesional dan relawan, khususnya psikolog agar penanganan kasus perlindungan anak dapat dilakukan secara optimal dan mendalam.

2. Pemerintah diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.
3. Tugas upaya perlindungan anak hendaknya dilakukan secara terpadu dan kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah, media, sektor bisnis serta lembaga masyarakat agar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya berfokus pada perolehan predikat, melainkan benar-benar dapat terwujud dalam bentuk perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.